



**BERHENTI
MENGAYOMI
KORUPSI**

Pemantauan Dana Kampanye Pilkada 2020

Indonesia Corruption Watch

6 Desember 2020

www.antikorupsi.org



Sepanjang 2004 - 2018
104 kasus korupsi kepala daerah ditangani
Komisi Pemberantasan Korupsi.



Pemantauan Dana Kampanye

- Pemantauan mencakup 30 daerah (9 Provinsi, 12 Kabupaten, dan 9 Kota)
- Data dikompilasi dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Laporan yang dipantau adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- Periode LADK: 23 September 2020 – 24 September 2020
- Periode LPSDK: 25 September 2020 – 30 Oktober 2020

Daerah yang Dipantau

No	Nama Daerah	Provinsi			
1	Provinsi Sumatera Barat	n/a	16	Kota Manado	Sulawesi Utara
2	Provinsi Jambi	n/a	17	Kota Medan	Sumatera Utara
3	Provinsi Bengkulu	n/a	18	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
4	Provinsi Kepulauan Riau	n/a	19	Kabupaten Sleman	DIY
5	Provinsi Kalimantan Tengah	n/a	20	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo
6	Provinsi Kalimantan Selatan	n/a	21	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat
7	Provinsi Kalimantan Utara	n/a	22	Kabupaten Klaten	Jawa Tengah
8	Provinsi Sulawesi Utara	n/a	23	Kabupaten Kediri	Jawa Timur
9	Provinsi Sulawesi Tengah	n/a	24	Kabupaten Malang	Jawa Timur
10	Kota Cilegon	Banten	25	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan
11	Kota Tangerang Selatan	Banten	26	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
12	Kota Surakarta	Jawa Tengah	27	Kabupaten Merauke	Papua
13	Kota Blitar	Jawa Timur	28	Kabupaten Manokwari	Papua Barat
14	Kota Surabaya	Jawa Timur	29	Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat
15	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	30	Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara



Sumber Dana Kampanye

- **Pasal 74 UU Pilkada**
- Sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik
- Sumbangan pasangan calon
- Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat (sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta)
- Batas sumbangan perseorangan Rp 75.000.000 dan badan hukum swasta Rp 750.000.000



Kenaikan Batas Sumbangan

	UU nomor 1 tahun 2015	UU nomor 10 tahun 2016
Batas sumbangan	Perseorangan Rp 50.000.000	Perseorangan Rp 75.000.000
	Badan hukum swasta Rp 500.000.000	Badan hukum swasta Rp 750.000.000



Sumber-sumber yang dilarang

- **Pasal 76 ayat (1) UU Pilkada**
- Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing
- Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain

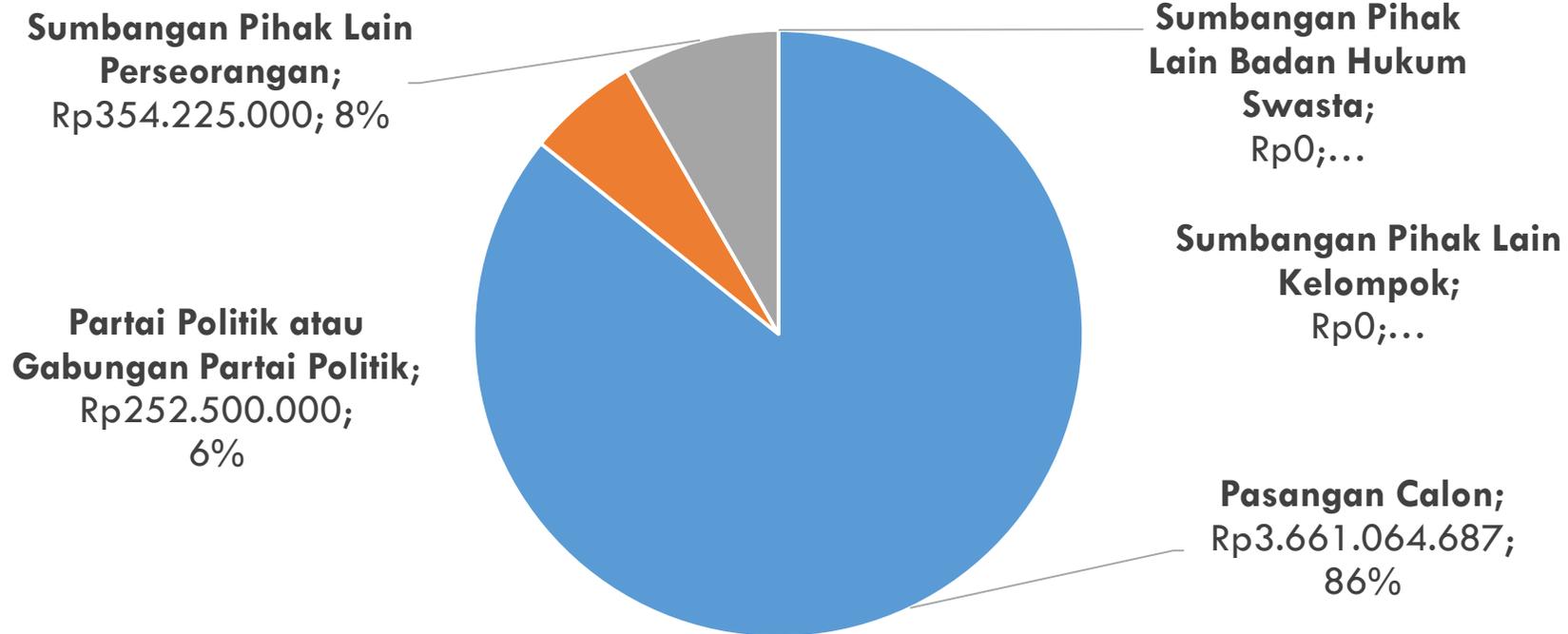


Sanksi

Tindakan	Sanksi
Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang telah diatur	<ul style="list-style-type: none">- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau- denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang dan/atau tidak memenuhi kewajiban	<ul style="list-style-type: none">- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau- denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye	<ul style="list-style-type: none">- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan- dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

LADK

Total Sumbangan Kampanye



LADK

Rata-Rata Sumbangan Kampanye

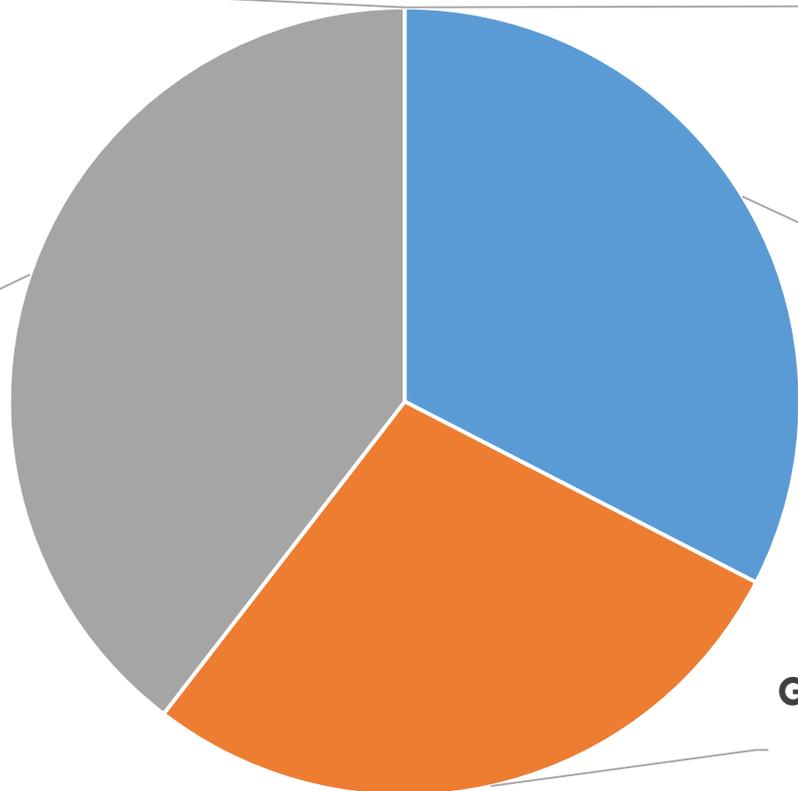
Sumbangan Pihak Lain
Kelompok;
Rp0;...

Sumbangan Pihak
Lain Badan Hukum
Swasta; Rp0
0%

Sumbangan Pihak
Lain Perseorangan;
Rp71.745.000;
39%

Pasangan Calon;
Rp59.096.265;
33%

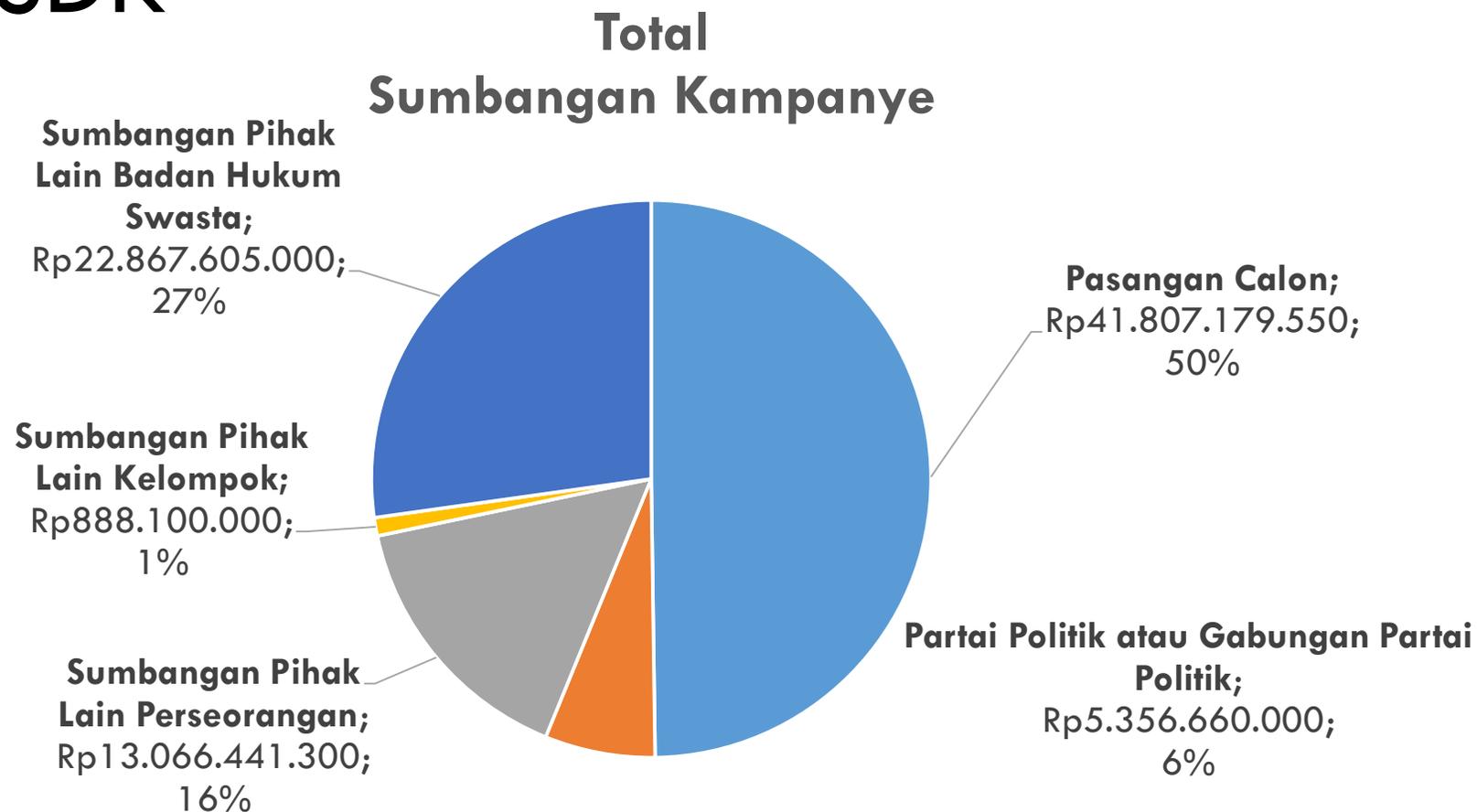
Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik;
Rp50.500.000;
28%



LADK Kosong

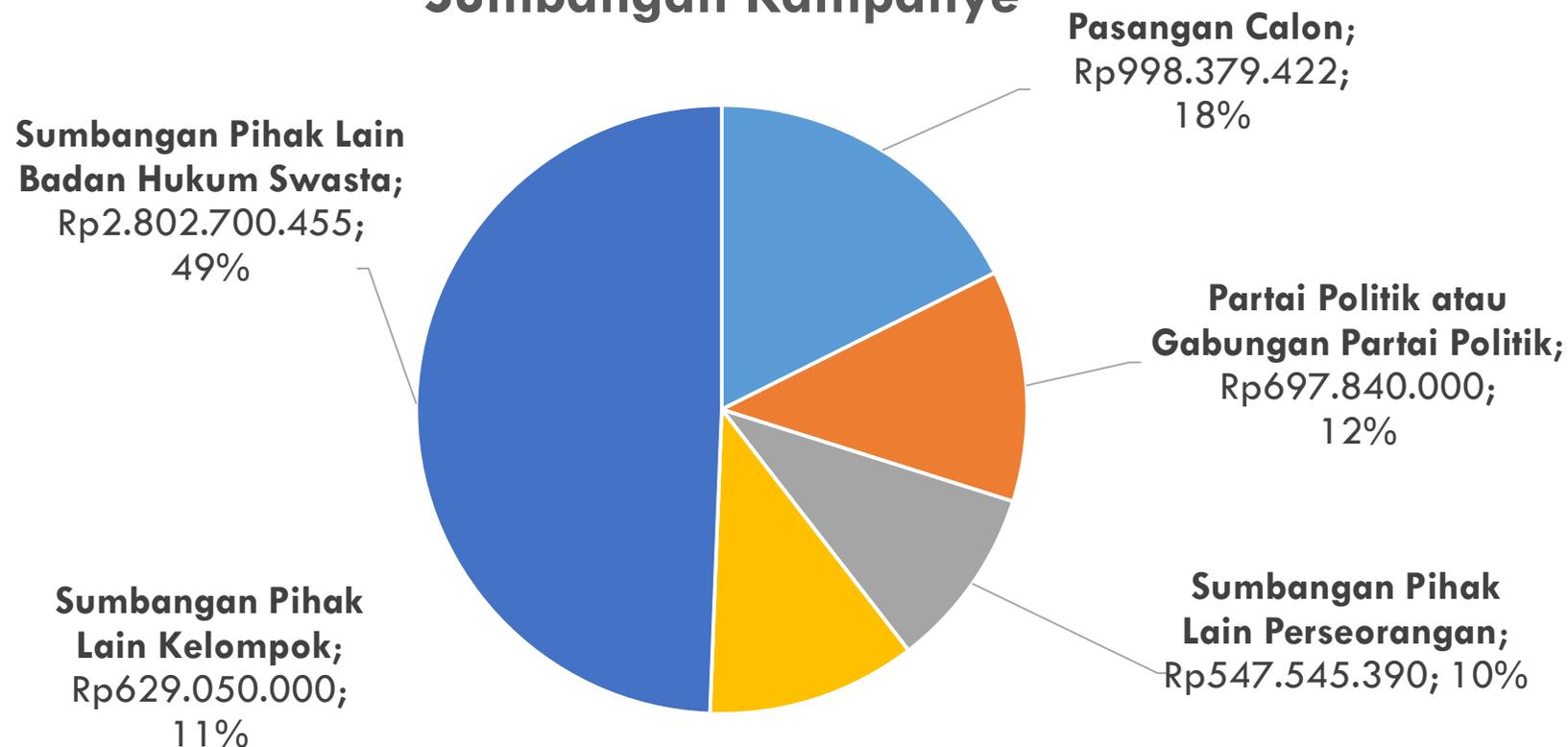
No	Nama Kepala Daerah	Nama Wakil Kepala Daerah	Daerah	Keterangan
1	H. Saidi Mansyur	Said Idrus	Kabupaten Banjar	Tidak Melampirkan Dokumen
2	Toto Sucartono	Deis Handika	Kabupaten Indramayu	LADK Kosong
3	Hanindhito Himawan Purnama	Dewi Maria Ulfa	Kabupaten Kediri	LADK Kosong
4	H.M. Sanusi, M.M	Drs. H. Didik Gatot Subroto, Sh., Mh.	Kabupaten Malang	LADK Kosong
5	Siti Sutinah Suhardi, Sh.,M.Si	Ado Mas Ud,S.Sos	Kabupaten Mamuju	Tidak Melampirkan Dokumen

LPSDK



LPSDK

Rata-Rata Sumbangan Kampanye



LPSDK Kosong

No	Nama Kepala Daerah	Nama Wakil Kepala Daerah	Daerah	Keterangan
1	Ir. Ben Brahim, S. Bahat., MM., MT	Dr.H. Ujang Iskandar, ST., M.Si	Provinsi Kalimantan Tengah	LPSDK kosong
2	Agusrin Maryono	Dr.Ir.H.M. Imron Rosyadi, MM., M.Si	Provinsi Bengkulu	LPSDK kosong
3	H. Surunuddin Dangga, ST., MM	Rasyid, S.Sos., M.Si	Kabupaten Konawe Selatan	LPSDK kosong
4	Ir. H. Lalu Makmur Said, MM.	H. Badruttamam Ahda	Kota Mataram	LPSDK kosong
5	H. Baihaqi, ST	Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH.	Kota Mataram	LPSDK kosong

Pasangan Calon dengan Penerimaan Sumbangan Tertinggi (Perseorangan, Partai Politik, Pihak Lain)

No	Nama Kepala Daerah	Nama Wakil Kepala Daerah	Daerah	Total
1	Munafri Arifuddin, SH	Dr Abd Rahman Bando, SP, MSI	Kota Makassar	Rp7.665.000.000
2	Drs. Machfud Arifin, S.H	Mujiaman	Kota Surabaya	Rp7.250.000.000
3	Ansar Ahmad, SE., MM	Marlin Agustina	Provinsi Kepulauan Riau	Rp4.300.000.000
4	H. Sugianto Sabran	H. Edy Pratowo, S.Sos., MM	Provinsi Kalimantan Tengah	Rp4.000.000.000
5	H. Mahyeldi, SP.	Ir. Audy Joinaldy, S.Pt M.Sc, M.M...	Provinsi Sumatera Barat	Rp3.940.000.000



Total Sumbangan Terendah (Selain yang berjumlah Rp 0) (Perseorangan, Partai Politik, Pihak Lain)

No	Nama Kepala Daerah	Nama Wakil Kepala Daerah	Daerah	Jenis Pemilihan	Total
1	Chamdi Ali Tumenggung Mayang	Tomy Ishak	Kabupaten Gorontalo	Bupati & Wakil Bupati	Rp4.900.000



Pasangan Calon dengan Sumbangan Tertinggi dari Pasangan Calon

No	Nama Kepala Daerah	Nama Wakil Kepala Daerah	Daerah	Total
1	Olly Dondokambey, S.E	Steven Octavianus Estefanus	Provinsi Sulawesi Utara	Rp3.821.440.000
2	H. Mahyeldi, SP.	Ir. Audy Joinaldy, S.Pt M.Sc, M.M...	Provinsi Sumatera Barat	Rp2.550.000.000
3	Munafri Arifuddin, SH	Dr Abd Rahman Bando, SP,MSI	Kota Makassar	Rp2.040.000.000
4	Ansar Ahmad, SE., MM	Marlin Agustina	Provinsi Kepulauan Riau	Rp2.000.000.000
5	Tonny S. Junus	H. Daryanto Gobel	Kabupaten Gorontalo	Rp1.797.950.000



Pasangan Calon dengan Sumbangan Tertinggi dari Partai Politik

No	Nama Kepala Daerah	Nama Wakil Kepala Daerah	Daerah	Total
1	Ansar Ahmad, SE., MM	Marlin Agustina	Provinsi Kepulauan Riau	Rp2.300.000.000
2	M. Bobby Afif Nasution	H.Aulia Rachman	Kota Medan	Rp1.500.000.000
3	Eri Cahyadi, S.T., M.T	Ir. Armudji	Kota Surabaya	Rp448.600.000
4	H. Saidi Mansyur	Said Idrus	Kabupaten Banjar	Rp250.000.000
5	Drs. H. Nasrul Abit	Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T	Provinsi Sumatera Barat	Rp182.000.000



Pasangan Calon dengan Sumbangan Tertinggi dari Perseorangan

No	Nama Kepala Daerah	Nama Wakil Kepala Daerah	Daerah	Total
1	H. Mahyeldi, SP.	Ir. Audy Joinaldy, S.Pt M.Sc, M.M...	Provinsi Sumatera Barat	Rp1.090.000.000
2	Drs. H. Benyamin Davnie	H. Pilar Saga Ichsan, ST	Kota Tangerang Selatan	Rp1.050.000.000
3	Drs. H. Muhamad, M.Si	Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo	Kota Tangerang Selatan	Rp1.016.500.000
4	Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si	H. Salman Alfarisi, Lc, MA	Kota Medan	Rp677.755.000
5	Eri Cahyadi, S.T., M.T	Ir. Armudji	Kota Surabaya	Rp674.001.000



Pasangan Calon dengan Sumbangan Tertinggi dari Kelompok

No	Nama Kepala Daerah	Nama Wakil Kepala Daerah	Daerah	Total
1	H.M. Sanusi, M.M	Drs. H. Didik Gatot Subroto, SH., MH.	Kabupaten Malang	Rp770.000.000
2	Muh. Endang SA. S.Sos., SH. M.Ap	H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH	Kabupaten Konawe Selatan	Rp118.100.000



Pasangan Calon dengan Sumbangan Tertinggi dari Badan Hukum Swasta

No	Nama Kepala Daerah	Nama Wakil Kepala Daerah	Daerah	Total
1	Drs. Machfud Arifin, S.H	Mujiaman	Kota Surabaya	Rp6.750.000.000
2	Munafri Arifuddin, SH	Dr Abd Rahman Bando, SP,MSI	Kota Makassar	Rp5.550.000.000
3	H. Sugianto Sabran	H. Edy Pratowo, S.Sos., MM	Provinsi Kalimantan Tengah	Rp3.750.000.000
4	Dr.H. Mohamad Hidayat Lamakarate	Dr.Ir.Bartholomeus Tandigala, SH	Provinsi Sulawesi Tengah	Rp2.223.805.000
5	Rusdy Mastura	Ma'mun Amir	Provinsi Sulawesi Tengah	Rp1.250.000.000



Catatan

- Terdapat pasangan calon yang mengisi LADK dan LPSDK dengan nihil
- Jumlah dana kampanye yang dilaporkan dalam LADK dan LPSDK tidak wajar jika dibandingkan dengan ongkos pemilu yang teramat tinggi



Catatan

- Sumber sumbangan masih dominan dari pasangan calon dan sumbangan pihak lain, terutama badan hukum swasta
- Sumbangan dari pihak lain masih belum tercermin secara jelas dan rinci
- Sumbangan dari partai politik masih relatif rendah dibanding sumber lainnya



Catatan

- Pengaturan mengenai sanksi dalam UU Pilkada belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan laporan dana kampanye
- Batas maksimal dana kampanye yang tidak diatur membuat kompetisi pilkada menjadi tidak adil



Catatan

- Pasangan calon tidak serius dalam melaporkan dana kampanye
- Kepatuhan dan kejujuran pasangan calon masih menjadi catatan utama
- Laporan dana kampanye masih dianggap sebagai formalitas
- Indikasi ketidakjujuran dalam melaporkan dana kampanye dapat menjadi ruang gelap bagi oligark/cukong untuk membiayai kandidat dalam pilkada
- Ketidadaan batas maksimal dana kampanye turut membuka celah bagi para oligark/cukong
- Parpol yang gagal memenuhi kebutuhan dana kampanye kandidat juga ikut menguntungkan para oligark/cukong



Rekomendasi

- Penguatan dari sisi regulasi agar mampu memaksa pasangan calon melaporkan dana kampanye secara patuh dan jujur
- Pengawasan oleh Bawaslu harus diperkuat dan pelibatan pihak lain dalam melakukan pengawasan (PPATK, Dirjen Pajak, dll)
- Perlu ada publikasi yang rinci mengenai laporan dana kampanye untuk membuka ruang gelap dana kampanye
- Audit dana kampanye harus dilakukan secara detail dan dibuka kepada publik
- Penguatan dari sisi etika



SEKIAN



INDONESIA CORRUPTION WATCH

2020

Foto: Twitter